

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 68.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.7
- Dean, G. Pruit dan Jeffrey, Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*, Mc. Graw-Hill Inc, hlm 32, 2004.
- Djoko Harmantyo, *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan; Kebijakan Otonom Daerah dan Implementasinya di Indonesia*, (Maksara Sins, Vol 11, No. 1 April 2007), hlm. 16-22.
- Dr. K. H. Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, CV Pustaka Setia Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.
- Ellydar Chaidar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17
- Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik Dan Nalar, sebagaimana dikutip oleh, Rahmat Bagja, Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945*, Skripsi, hlm.41
- Fadjar, Abdul Mukhtie., *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Citra Media, Jakarta, 2006.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.209.
- Ferdinan Paulus Anyab, *Sengketa Batas Wilayah Dalam Sistem Pemerintah Daerah (Studi Pada Batas Wilayah Kabupaten Sintang Dan Kabupaten Sekadau)*, (MLJ Merdeka Law Journal, Vol. 2 No. 2, hlm. 110-117, 2021).
- Hasyim, dkk, *Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara; Studi Kasus Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera tentang Enam Desa*, Solidarity; Gadjah Mada Press, 2010, hlm, 62.
- HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas Gravenhage*, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hal. 102.
- Herman Heller, "*Staatlehre*" *Herausgegeben Von Gerhart Niemeyer*
- Ibrahim, Jhonny., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, cet.2, Malang, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.69.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen, 1998, hlm.16-17.
- Jones, Stephen, *Boundary Making, A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, William S. Hein & Co., Inc, Buffalo, New York, 2000
- Kemendagri.co.id, <https://otda.kemendagri.go.id/wpcontent/uploads/2019/05/Data-Jumlah-DOB-beserta-Kecamatan-Keluarahan-dan-Desa.pdf>
- Kemendagri.co.id, [74](https://otda.kemendagri.go.id/wpcontent/uploads/2019/05/Data-</p></div><div data-bbox=)

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1338
- Lotulung, Paulus Effendi., *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Mirza Nasution, Negara dan Konstitusi, USU digital library, dikutip dari, <http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegar-mirza.pdf>.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), hlm. 64
- Murhani, Suriansyah., *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Cetakan 1, Malang 2008.
- Mursyridyansyah, *Konflik Tapal Batas: Studi Kasus Mengenai Sebab-sebab dan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu*, Thesis, Sekolah Paska Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta 2007.
- Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi, (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hal.7.
- Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
- Peraturan Menteri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
- Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hal.76.
- Putra, Harry Setya, *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 No. 1, hlm. 226-240, Maret 2020).
- Qodir, Zuly dan Tanjung Laksono, *Politik Rented an Konflik di Daerah Pemekaran "Kasus Maluku Utara"* Working Paper No. 002/JKSG/2012.
- Riwukaho, Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.
- Rusma Dwiyan, *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System*, Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. hlm.3.
- Russel F. Moore, *Modern Constitution*, sebagaimana dikutip oleh, Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17
- Saru Arifin, *Penyelesaian sengketa Batas daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, (Jurnal Hukum, Ius Quaia Istium, Vol 23, 2016).
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hlm. 55.

Sri Soemantri M, *Susunan Ketatanegaraan menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*.

Suara Publik, 2011, <https://suara-publik.com/detailpost/sengketa-batas-wilayah-kawah-ijen-assisten-i-pemkab-bondowoso-bantah-pernyataan-assisten-i-banyuwang>, diakses pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 00.16 WIB

Tilly, Charles, “*Social Boundary Mechanisms*” *Philosophy of the Social Sciences* 34(2):211–36, 2004.

Triningsih, dkk, *Penyelesaian Sengketa Wilayah di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia.

Wijardjo, Boedi, et.al. (eds), *Konflik, Bahaya atau Peluang?: Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam*, Pustaka Pelajar, Bandung, hal.52, 2001.

Wijoyo, Ardi E. dan Hasanah, Yuliana U., *Batas Daerah Sebagai Penentu Kebijakan Pembangunan*, FIT Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Vol. 1, 2021, hlm, 107-112.

Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni“matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.7

Yana Sahyana, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, (*Jurnal Konstituen*, Vol 1 No.1, January 2019).

Youkwart, Gilberd L. *Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura*, *Jurnal Kebijakan Publik* Vol. 3 No. 1 2020, hlm, 28-38.